

**PERSEPSI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**
Studi di SMP Negeri 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

TESIS

Oleh:

EDI SAPUTRA NAGABE SIREGAR
NPM. 161801038



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/20/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PERSEPSI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Studi di SMP Negeri 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi
Publik Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh:

**EDI SAPUTRA NAGABE SIREGAR
NPM. 161801038**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/20/19

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

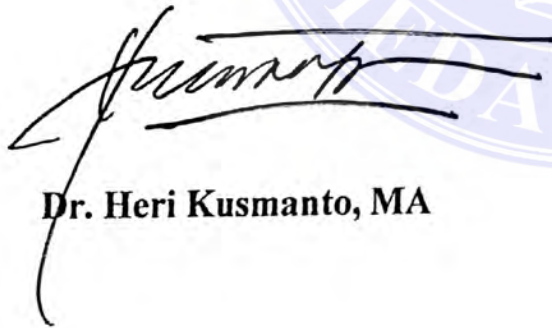
Judul : Persepsi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Di SMP Negeri 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

N a m a : Edi Saputra Nagabe Siregar

N P M : 161801038

Menyetujui

Pembimbing I



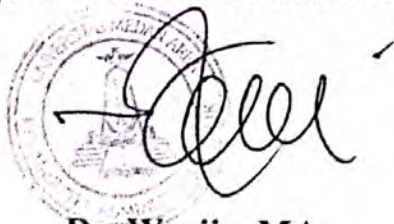
Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Refna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/20/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)

Telah diuji pada tanggal 12 Mei 2018

N a m a : Edi Saputra Nagabe Siregar

N P M : 161801038



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Sekretaris : Drs. Kariono, MA
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Penguji Utama : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/20/19

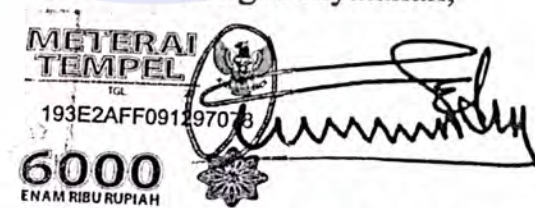
Access From (repository.uma.ac.id)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2018

Yang menyatakan,



Edi Saputra Nagabe Siregar

A B S T R A K

PERSEPSI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH NEGERI

Studi Di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

N a m a : Edi Saputra Nagabe Siregar
NPM : 161801038
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tuntas dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :Keberhasilan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dilihat dari aspek : komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi, dan hasil yang diperoleh serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampel diambil secara *purposive sampling*, sebanyak 43 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan rata-rata total skor 2,75, maka termasuk dalam kategori baik dalam arti bahwa pelaksanaan program Program Bantuan Operasional Sekolah SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut telah berjalan secara efektif. Apabila dilihat dari masing-masing indikator, dari keempat indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program (komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi,), hanya indikator sumber-sumber yang termasuk dalam kategori sedang. Hambatan utama yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program adalah berkaitan dengan hambatan penyaluran dana BOS yang belum merata atau memenuhi harapan seluruh masyarakat.

Kata Kunci : Persepsi pelaksanaan program, bantuan operasional sekolah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL SCHOOL AIDS PROGRAM ON PUBLIC SCHOOL

Study In SMPN 2 Padang Bolak Padang Lawas Utara District

N a m e : ***Edi Saputra Nagabe Siregar***
NPM : ***161801038***
Study Program : ***Master of Science in Public Administration***
Supervisor I : ***Dr. Heri Kusmanto, MA***
Supervisor II : ***Dr. Isnaini, SH, M.Hum***

Development of education is one of the main priorities in the national development agenda. Development of education is very important because of its significant role in achieving progress in various areas of life: social, economic, political, and cultural. Therefore, the Government is obliged to fulfill the right of every citizen in obtaining education service to improve the quality of life of the Indonesian nation. The School Operational Assistance (BOS) program aims to free up the cost of education for underprivileged and light-weighted students for them to obtain better quality basic up to basic education services in order to complete the 12-year compulsory education. This study aims to find out: The success of the School Operational Assistance Program (BOS) in SMPN 2 Padang Bolak Kabupaen Padang Lawas Utara is seen from the aspects of: communication, sources, trends, bureaucratic structure, and the results obtained and the factors that influence it. The sample was taken by purposive sampling, as many as 43 people. Data analysis was done by using quantitative descriptive method. The results showed that Implementation of School Operational Assistance Program SMPN 3 Padang Bolak Kabupaen Padang Lawas Utara in accordance with the established criteria, which is the average total score of 2.75, it is included in the category either in the sense that the perseptin of the program School Operational Assistance Program SMPN 2 Padang Bolak Kabupaen Padang Lawas Utara has been running effectively. When viewed from each indicator, of the four indicators used to measure program implementation (communication, resources, trends, bureaucratic structure,), only indicators of resources fall into the medium category. The main obstacles that are still found in the implementation of the program are related to the obstacles to the disbursement of BOS funds that have not been evenly distributed or meet the expectations of the entire community.

Keywords: Perception Program implementation, school operational assistance

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah “Persepsi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Negeri, Studi di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah membantupenulis baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc, Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi PublikProgram Pascasarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.

5. Bapak Dr. Isnaini, SH. M.Hum, Wakil Direktur Bidang Akademik, sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
6. Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara beserta seluruh guru dan staf yang telah memberikan informasi demi penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
8. Terimakasih pula buat Istri Tercintadan anak-anakku tersayang serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang berlimpat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Medan, 15 April 2018

P e n u l i s

Edi Saputra Nagabe Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAKSI	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Persepsi.....	7
2.1.1 Pengertian Persepsi	7
2.1.2 Proses Pemahaman Persepsi	9
2.2. Kebijakan Publik	10
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.2.2. Proses Analisa Kebijakan Publik.....	10
2.2.3. Implementasi Kebijakan	12
2.3. Pendekatan-pendekatan Implementasi	23
2.4. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	28
2.4.1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Waktudan Tempat Penelitian	42
3.2. Bentuk Penelitian.....	42
3.3. Populasi dan Sampel.....	43
3.4. Teknik Pengumpulan Data	43

3.5. Devinisi Konsep	45
3.6. Teknik Analisis Data	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Kab. Padang Lawas Utara.....	48
4.2. Hasil Penelitian.....	59
4.2.1.Karakteristik Responden	59
4.2.2.Variabel Penelitian	62
4.3. Analisa Data	85
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	91
5.2. Saran - Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	59
4.2	Distribusi Responden Menurut Umur	60
4.3	Distribusi Responden Menurut Pendidikan	60
4.4	Distribusi Responden Menurut Kedudukan dalam program	61
4.5	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Program Bantuan Operasional Sekolah	63
4.6	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Tujuan Program	64
4.7	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Perangkat Aturan dalam Program	64
4.8	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Peraturan tertulis dalam pelaksanaan Program	67
4.9	Pendapat Responden Tentang Pemahaman Peraturan dalam Program	68
4.10	Pendapat Responden Tentang Hak dan Kewajiban dalam Program	69
4.11	Pendapat Responden Tentang Perkembangan Program Bantuan Operasional Sekolah	70
4.12	Pendapat Responden Tentang Pengaturan Program Bantuan Operasional Sekolah	72
4.13	Pendapat Responden Tentang Bentuk Aturan Pemerintah dalam Program Bantuan Operasional Sekolah	72
4.14	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumberdaya dalam Mendukung Kelancaran Program Bantuan Operasional Sekolah	73
4.15	Pendapat Responden Tentang Kecukupan Dana untuk Program Bantuan Operasional Sekolah	74
4.16	Pendapat Responden Tentang Dukungan Prasarana untuk Mengelola Program Bantuan Operasional Sekolah	75
4.17	Pendapat Responden Tentang Peranan Pemerintah dalam Memberikan Penyuluhan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah	76
4.18	Pendapat Responden Tentang Peranan Pemerintah dalam Memberikan Penyuluhan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah	76

4.19	Pendapat Responden Tentang Peranan Komite Sekolah dalam Memberikan Penyuluhan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah	77
4.20	Pendapat Responden Tentang Peranan Dinas Pendidikan dan Pengajaran dalam Memberikan Penyuluhan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah	78
4.21	Pendapat Responden Tentang Kualitas Pelayanan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah	79
4.22	Pendapat Responden Tentang Pertemuan yang Dilaksanakan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah	79
4.23	Pendapat Responden Tentang Pertemuan yang Dilaksanakan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah	80
4.24	Pendapat Responden Tentang Keterpaduan Komponen Pelaksanan Dalam Program Bantuan Operasional Sekolah	80
4.25	Pendapat Responden Tentang Pengaruh dari Luar Komponen yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah	81
4.26	Pendapat Responden Tentang Perkembangan Program Bantuan Operasional Sekolah	82
4.27	Pendapat Responden Tentang Tingkat Keberhasilan Program Bantuan Operasional Sekolah	83
4.28	Pendapat Responden Tentang Hambatan dalam Perencanaan Program Bantuan Operasional Sekolah	83
4.29	Pendapat Responden Tentang Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Program Bantuan Operasional Sekolah	84
4.30	Pendapat Responden Tentang Hambatan dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Program Bantuan Operasional Sekolah	85
4.31	Persepsi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Lokasi dan Seleksi	34
Gambar 2	Mekanisme Penyaluran Dana BOS	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global.

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Kenaikan harga BBM beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada Tahun 2015, APK tingkat SMP sebesar 85,22% dan pada akhir 2010 telah mencapai 88,68%. Target penuntasan Wajar 9 tahun harus dicapai pada Tahun 2015/2009 dengan APK minimum 95%. Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 1,5 juta anak usia 13-15 tahun yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Selain masalah pencapaian target APK, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya mutu pendidikan yang antara lain mencakup masalah tenaga kependidikan, fasilitas, manajemen, proses pembelajaran dan prestasi siswa. (Profil Pendidikan tahun 2010)

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, amanat undang-undang dan upaya tahun yang bermutu, Pemerintah melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB

negeri/Swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tuntas dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Selain itu, Madrasah Diniyah Takmiliah (suplemen) juga tidak berhak memperoleh Bos, karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima BOS.

Sejalan Visi Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018 : **"Bersama Membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju Dan Beradat "**. Sedangkan Misi Kabupaten Padang Lawas Utara adalah (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola birokrasi dan perluasan partisipasi public, (2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, (3) Membangun masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuha Yang Maha Esa dengan bingkai kearifan lokal dan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (4) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan memperhatikan penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang laun, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknis operasional.

Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

Namun kebijakan Dana BOS bukan berarti behentinya permasalahan pendidikan, masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS, dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS, tujuan dari pemerintah sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah baru, selain itu pribadi dan budaya manusia Indonesia ikut berpengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua elemen dalam mewujudkan efektifitas pengelolaan dana BOS.

Dari banyaknya masalah yang diidentifikasi seperti yang disebutkan sebelumnya seperti kesesuaian dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan, masalah efisiensi penggunaan sumberdaya, masalah kesamaan antar kelompok yang berbeda dan ketepatan sasaran dan dapat memberikan dampak

yang signifikan pada kelompok sasaran. Oleh karena itu, kami memilih untuk mengangkat masalah pengelolaan dana BOS serta permasalahannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program BOS khususnya pada SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Persepsi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Negeri, Studi Di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk menganalisis persepsi pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- 1) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Keberhasilan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 2) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang analisis kebijakan publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Persepsi

2.1.1 Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang

akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya.

Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118). Persepsi adalah proses dimana orang memilih, mengatur dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang berarti. (Kotler dan Armstrong (2008:147). Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2008:137) persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia.

Kotler dan Keller (Fadila dan Ridho, 2013:45) mengemukakan bahwa persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan dalam bentuk fisik, tetapi juga tergantung pada rangsangan yang ada disekitarnya dan kondisi yang ada pada

seseorang dan persepsi lebih penting dibandingkan realitas dalam pemasaran, karena persepsi yang dapat mempengaruhi konsumen dalam berperilaku, selain itu orang bisa mempunyai persepsi yang berbeda atas objek yang sama, persepsi dapat bersifat positif dan negatif.

2.1.2 Proses Pemahaman Persepsi

Menurut Kotler dan Keller (2009:180), persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Orang bisa mempunyai persepsi berbeda tentang obyek yang sama karena tiga proses yaitu:

- a. **Atensi Selektif** Berarti pemasar harus bekerja keras untuk menarik perhatian konsumen. Tantangan sesungguhnya adalah menjelaskan rangsangan mana yang akan diperhatikan orang.
- b. **Distorsi Selektif** Distorsi selektif adalah kecenderungan menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan pra-konsepsi kita. Konsumen akan sering memilintir informasi sehingga menjadi konsisten dengan keyakinan awal mereka atas merek dan produk.
- c. **Retensi Selektif** Retensi selektif biasanya konsumen cenderung mengingat hal-hal baik yang disebutkan tentang produk yang kita sukai dan melupakan halhal balik yang disebutkan tentang produk pesaing. Ingatan selektif menjelaskan mengapa para pemasar menggunakan drama dan pengulangan dalam mengirimkan pesan ke pasar sasaran mereka untuk memastikan bahwa pesan mereka tidak diremehkan.

2.2. Kebijakan Publik

2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Riant Nugroho (2008:55) merumuskan definisi kebijakan publik secara sederhana bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Dalam Budi Winarno (2007:30-31) kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik.

2.2.2. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara

masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus bahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama;

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik;

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan;

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana;

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yang memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini penulis membatasi dan hanya akan membahas tentang evaluasi kebijakan publik.

2.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu Kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu Kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi Kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam Kebijakan Publik.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (1980), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi Kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-

keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Jones (1977) menganalisis masalah pelaksanaan Kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones (1977) mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas actor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah :

1. **Penafsiran** yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. **Organisasi** yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. **Penerapan** yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

Kebijakan dapat diartikan sebagai arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Winarno, 2002 : 31). Ada beberapa pendekatan dalam studi kebijakan publik, dan salah satunya adalah pendekatan kelembagaan. Suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah memberi dua karakteristik yang berbeda terhadap kebijakan publik (Winarno, 2002 : 42-43), yaitu :

Pertama, pemerintah memberi legitimasi kepada kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum dipandang sebagai kewajiban-kewajiban yang sah yang menuntut loyalitas warga negara. Rakyat mungkin memandang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok dan asosiasi-asosiasi lain dalam masyarakat. Tetapi hanya kebijakan-kebijakan pemerintah sajalah yang membutuhkan kewajiban-kewajiban yang sah.

Kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah memerlukan universalitas. Hanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjangkau dan dapat menghukum secara sah orang-orang yang melanggar kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah mempunyai kemampuan membuat kebijakan yang mengatur seluruh masyarakat dan memonopoli penggunaan kekuatan secara sah yang mendorong individu-individu dan kelompok membentuk pilihan-pilihan mereka dalam kebijakan.

Winarno (2002 : 27) menjelaskan bahwa analisis kebijakan berhubungan dengan pendidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi

kebijakan publik. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan, yakni :

Pertama, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan anjuran kebijakan yang “pantas”. *Kedua*, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. *Ketiga*, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda (Thomas R. Dye dalam Winarno, 2002 : 27).

Ciri lain dari kebijakan adalah tingkat konflik atau konsensus atas tujuan-tujuan dan sasaran-sasarannya (Winarno, 2002 : 107). Ciri ini dilihat dari mana para pejabat yang melaksanakan kebijakan mempunyai kesepakatan terhadap tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran program.

Kebijakan publik sebagai kajian Ilmu Administrasi Negara dewasa ini telah banyak mendapat perhatian dari banyak pihak baik mereka yang tidak terlibat dalam implementasi kebijaksanaan maupun para pelaksana dan ilmuwan yang berminat dalam masalah kebijaksanaan negara. Sedangkan Kebijakan publik menurut Dye (dalam Islamy, 1998 : 18) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan menurut Laswell dan Kaplan (dalam Islamy, 1998 : 17) adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Akan tetapi dewasa ini istilah kebijaksanaan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan

tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya (Johnson dalam Abdul Wahab, 1990 : 13). Definisi lain menyebutkan bahwa : “Kebijaksanaan negara adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Jenkins dalam Abdul Wahab, 1990 : 4).

James P. Lester dan Joseph Stewart (dalam Winarno, 2002 : 101) menjelaskan konsep implementasi kebijakan sebagai alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 : 102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok) pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dengan demikian fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan suatu tujuan atau sasaran kebijakan publik yang diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Abdul

Wahab, 1990: 123). Sementara itu ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengkaji implementasi kebijakan yaitu (Ripley dalam Wibawa dkk, 1994: 96) :

1. Pendekatan kepatuhan (*compliance*) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil jika para pelaksana kebijakan mematuhi petunjuk – petunjuk yang diberikan birokrasi atau yang menetapkan kebijakan itu.
2. Pendekatan *what happening* yang melihat pelaksanaan kebijakan dari segala hal. Asumsinya adalah bahwa implementasi kebijakan melibatkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan demikian apa yang terjadi implementasi jauh lebih penting dikaji daripada mempersoalkan sesuai tidaknya implementasi dengan keharusan – keharusan yang semestinya dilakukan.

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan, ada beberapa model yang dapat digunakan. Salah satu model yang dapat digunakan adalah Model Sabatier dan Mazmanian (dalam Wibawa dkk., 1990 : 16) yang menyatakan bahwa: “ Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu: (1) karakteristik masalah, (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan dan (3) faktor - faktor di luar peraturan”. Sabatier dan Mazmanian ini terkesan menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis). Oleh karena itu model ini sering disebut sebagai Model Top Down. Implementasi suatu program pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya suatu kebijakan dioperasionalkan dan

mempermasalahkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Di samping itu, untuk mengetahui bagaimana hubungan suatu variabel tertentu terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan (Grindle dalam Abdul Wahab, 1990 : 59). Grindle (dalam Wibawa dkk., 1990 : 22) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu : *content of policy* dan *contexts of policy*. *Content of policy* berisi enam variabel, yaitu :

1. kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan,
2. tipe keuntungan dan kebijakan,
3. tingkat perubahan yang diharapkan
4. kedudukan pembuatan kebijakan,
5. implementor program
6. sumber daya yang dikerahkan.

Tingkat derajat perubahan tingkah laku yang mencakup dalam program adalah salah satu dari isi kebijakan yang berpengaruh terhadap implementasi. Selanjutnya Brian W. Hoogwod dan Lewis A. Gunn (dalam Wibawa dkk., 1990 : 57) mengemukakan suatu model yang sering disebut “*thetop down approach*”,

dimana ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan atau program :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi badan/institusi pelaksana;
2. Waktu dan sumber daya yang memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijakan didasari oleh adanya hubungan kausalitas;
5. Hubungan kausalitas tersebut bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil,
7. Pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas terperinci dan urutan yang tepat;
9. Koordinasi dan Komunikasi yang sempurna.

Berdasarkan pendapat Hoogwod dan Gunn tersebut, salah satu faktor di atas yaitu komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implemenatsi suatu kebijakan. Di samping itu, Van Horn dan Van Meter (dalam Wibawa dkk., 1990 : 9) menegaskan pula pentingnya komunikasi antar organisasi pelaksana dan organisasi di dalam implementasi-implementasi kebijakan. Keduanya menjelaskan proses implementasi dengan merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Lebih lanjut Van Horn dan Van Meter (dalam Wibawa dkk., 1990 : 9) menjelaskan :

“Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain : (a) Kejelasan standar dan tujuan; (b) Sumber daya; (c) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas

pengukuhan; (d) Karakteristik organisasi dan komunikasi antar organisasi; (e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik; dan (f) Sikap pelaksana.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2000 : 109-121) menawarkan suatu model implementasi. Model ini mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian. Variabel-variabel tersebut antara lain :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, perlu mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian, indikator ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dalam melakukan implementasi, tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (insentif) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Dalam melihat badan-badan pelaksana, maka tidak akan lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor tersebut mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

6. Kecenderungan pelaksana

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Para pelaksana mungkin menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut, dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi *implementasi* kebijakan yang berhasil.

Berbagai studi teoritis maupun empiris mengakui bahwa birokrasi yang sangat mengagungkan rasionalitas dan efektivitas serta efisiensi merupakan bentuk organisasi yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan dan modernisasi, sehingga birokrasi adalah alat pemerintahan yang sangat utama dan paling dominan perannya. Dominasi birokrasi ini terjadi bukan semata-mata

karena kelemahan swasta dan preferensi ideologi di negara-negara tadi, tetapi lebih karena luasnya jangkauan birokrasi pemerintah sehingga memiliki fungsi integratif yang sangat besar.

Menurut Muhaimin (1989:75) agar birokrasi modern dapat berfungsi secara efektif, ada dua prinsip dasar yang harus dipahami, diantaranya yaitu :

“*Pertama*, birokrasi harus menuruti tata cara yaitu peraturan-peraturan yang telah diciptakan sesuai dengan norma yang ada, artinya tidak bisa birokrasi itu bekerja atas dorongan perasaan dan kekeluargaan, jadi harus ada norma tertentu yang mampu merefleksikan suatu kepastian (*certain*) yang baik bagi pemerintah atau penguasa untuk masyarakat. Jadi ada semacam *predictability* yang bisa diciptakan oleh birokrasi. Oleh karenanya birokrasi harus menuruti peraturan yang telah ditetapkan bersama. *Kedua*, birokrasi itu seharusnya tidak terkait dengan kekuasaan jelasnya birokrasi harus apolitis”.

Selanjutnya di dalam setiap lingkungan terdapat apa yang dinamakan pola-pola perilaku (*pattern of behavior*) . Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak dan berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tertentu. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya (Soekanto, 1990 : 127).

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2000 : 116) menyetujui beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu :

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;

3. Sumber-sumber politik suatu organisasi;
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; dan,
6. Kaitan formal dan informal suatu badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

2.3. Pendekatan-pendekatan Implementasi

Setidaknya ada empat pendekatan implementasi (Abdul Wahab, 1990 : 110-120), yaitu :

1. Pendekatan-pendekatan struktural

Struktur-struktur yang bersifat organis dianggap cocok dalam lingkungan/situasi yang penuh dengan ketidakpastian atau lingkungan yang sedang mengalami perubahan yang cepat. Struktur-struktur seperti ini mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, sebagian karena mereka memiliki kemampuan yang besar untuk mengolah informasi. Khususnya bila dibandingkan dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada organisasi birokrasi yang tradisional yang menekankan pada saluran-saluran resmi dan komunikasi vertikal.

Secara umum dapat dikatakan bahwa struktur yang bersifat organis nampaknya amat cocok untuk situasi-situasi implementasi di mana memerlukan rancang bangun struktur-struktur yang mampu melaksanakan suatu

kebijaksanaan yang senantiasa berubah bila dibandingkan dengan merancang bangun suatu struktur khusus untuk program yang sekali selesai. Namun, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, bentuk struktur yang seringkali tidak mudah diterima di kalangan dinas-dinas pemerintah. Untuk itu bentuk struktur yang sifatnya kompromistis barangkali adalah struktur matrik dimana departemen-departemen vertikal bersilangan dengan tim-tim proyek antardepartemen horisontal (atau satuan-satuan tugas, kelompok-kelompok program dan sebagainya) yang dikepalai oleh pimpinan-pimpinan proyek. Kombinasi struktur yang bersifat birokratik dan adhokrasi ini mengandung kelemahan tertentu, misalnya adanya kewenangan ganda, tetapi bagaimanapun ia lebih luwes bila dibanding struktur-struktur model mesin pemerintah yang selama ini ada.

2. Pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial

Teknik manajerial yang merupakan perwujudan dari pendekatan ini ialah perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (*Networking Planning and Control-NPC*) yang menyajikan suatu kerangka kerja dalam mana proyek dapat direncanakan dan implementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan, hubungan diantara tugas-tugas tersebut, dan urutan logis di mana tugas-tugas itu harus dilaksanakan. Bentuk-bentuk jaringan kerja (*network*) yang canggih, semisal *Programme Evaluation and Review Technique* (PERT) memungkinkan untuk memperkirakan secara tepat jangka waktu penyelesaian tiap-tiap tugas, menghitung lintasan kritis di mana setiap keterlambatan akan dapat menghambat penyelesaian keseluruhan proyek, memonitor setiap luang waktu yang tersedia bagi penyelesaian tugas

dalam jaringan kerja, dan mengalokasikan sumber-sumber guna memungkinkan kegiatan-kegiatan yang terletak di sepanjang lintasan kritis dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Analisis jaringan kerja juga dipergunakan dalam penyelesaian tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Meskipun dalam hal ini harus dicatat bahwa sebab-sebab terjadinya perbedaan dari jadwal semula yang diungkapkan oleh jaringan kerja masih harus diidentifikasi oleh para manajer (yang seharusnya lebih dahulu menyadari perbedaan-perbedaan itu sebelum terpampang pada layar komputer), yang juga akan memikul tanggung jawab untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan semua itu seringkali terjadi di lapangan dan bukannya di ruang komputer. Realokasi sumber-sumber dari suatu tugas ke tugas yang lain mungkin dihambat oleh adanya keharusan untuk menegosiasikan perubahan-perubahan tertentu dengan pihak terkait.

3. Pendekatan-pendekatan keprilakuan

Ada keterbatasan-keterbatasan tertentu mengenai apa yang dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan-pendekatan struktural dan prosedural di atas. Perilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula dipengaruhi kalau kebijaksanaan ingin dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keprilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan. Dalam kenyataannya, alternatif-alternatif yang tersedia jarang sekali yang sesederhana seperti menerima atau menolak dan sebenarnya terbentang spektrum kemungkinan reaksi sikap, mulai dari penerimaan aktif

hingga penerimaan pasif, acuh tak acuh, dan penolakan pasif hingga penolakan aktif.

Penerapan analisis keprilakuan pada masalah-masalah manajemen yang paling terkenal ialah yang disebut “OD” (*Organizational Development/Pengembangan Organisasi*). OD adalah suatu proses untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan ilmu-ilmu keprilakuan. Tekanan perhatian konsultasi dalam OD adalah lebih pada penganalisaan proses pemecahan masalah, bukannya menyarankan cara-cara pemecahan tertentu atas permasalahan yang dihadapi. Dengan cara-cara merumuskan masalah dan cara bagaimana menanggulunginya, diharapkan pemecahan yang lebih baik akan dapat dilakukan oleh organisasi itu sendiri.

Bentuk lain dari pendekatan keprilakuan ialah *Management by Objectives* (MBO). MBO adalah suatu pendekatan yang menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam pendekatan prosedural/manajerial dengan unsur-unsur yang termuat dalam analisis keprilakuan. Jelasnya, MBO berusaha menjembatani antara tujuan-tujuan yang telah dirumuskan secara spesifik dengan implementasinya. Unsur-unsur pokok yang biasanya melekat pada MBO, adalah:

- a. Harus ada penjenjangan tujuan-tujuan, sehingga seorang manajer dapat melihat bagaimana tujuan-tujuan pribadinya, jika dapat dicapai, akan menunjang terhadap tujuan-tujuan organisasi;
- b. Proses untuk mencapai tujuan –tujuan atau sasaran-sasaran yang bernaung di bawah nama MBO haruslah bersifat interkatif, yakni didasarkan atas

musyawatah dan sejauh mungkin, didasarkan atas persetujuan bersama. Jika tujuan-tujuan tersebut semata-mata disodorkan oleh para manajer, maka sistem tersebut jelas bukanlah MBO.

- c. Harus ada suatu sistem penilaian atas prestasi kerja yang mencakup suatu kombinasi monitoring kemampuan diri manajemen dan pengawasan melekat dan evaluasi bersama terhadap kemajuan-kemajuan oleh tiap manajer dan atasan-atasan.

4. Pendekatan-pendekatan politik

Pendekatan politik ini secara fundamental menentang asumsi yang diketengahkan oleh ketiga pendekatan sebelumnya (khususnya pendekatan keprilakuan). Pada umumnya para ilmuwan sosial menentang asumsi bahwa konflik itu adalah suatu bentuk penyimpangan yang dapat disembuhkan dengan cara menyempurnakan kemampuan komunikasi antar pribadi. Konflik yang berlangsung diantara dan di dalam lingkungan kebanyakan organisasi dan kelompok-kelompok sosial merupakan gejala yang sifatnya endemis, karenanya tidak bisa hanya diatasi lewat komunikasi dan koordinasi.

Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijaksanaan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan/berpengaruh (atau koalisi dari kelompok-kelompok ini) untuk memaksakan kehendaknya. Apabila kelompok yang dominan itu tidak ada, implementasi kebijaksanaan yang dikehendaki mungkin hanya akan bisa di capai melalui suatu proses panjang yang bersifat inkremental dan saling pengertian di antara mereka yang terlibat. Dalam situasi tertentu distribusi kekuasaan

kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijaksanaan, walaupun sebenarnya kebijaksanaan tersebut secara formal telah disahkan.

Keempat pendekatan implementasi di atas setidaknya mempunyai penekanan sendiri-sendiri, karena itulah ada pendekatan yang tepat digunakan untuk konteks tertentu, dan sebaliknya. Berdasarkan kenyataan ini, maka penelitian mengenai persepsi pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 2Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara akan lebih khusus menggunakan pendekatan prosedural dan manajerial, yaitu akan diterapkan pada SMPN 2Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

2.4. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.4.1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Agar pelaksanaan program PKPS-BBM dan masyarakat memahami program BOS dengan benar, maka dalam Bab ini akan diuraikan definisi tentang Biaya Pendidikan dan terminologi program BOS. Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaannya, BSP dibedakan menjadi BSP Investasi dan BSP Operasional. BSP Investasi adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumberdaya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun, misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP Operasional

adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumberdaya pendidikan yang habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang. BSP Operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil.

Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM), guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), uang lembur) dan pengembangan profesi guru (Pendidikan dan Latihan (diklat) guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru, (KKG), dll). Biaya non personil adalah biaya untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS-BBM Bidang Pendidikan ini secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai oleh BOS dibahas pada Bab berikutnya. Namun perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi.

Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah Pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah.

A. Sekolah Penerima BOS

1. **Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS.** Khusus sekolah swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang terutang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini.
2. **Sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS,** mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Bilamana di sekolah terdapat siswa miskin, sekolah tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut.

B. Ketentuan yang Harus Diikuti Sekolah Penerima BOS

Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut.

1. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas

Bagi Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis para periode sebelumnya, maka sekolah tersebut **harus tetap membebaskan** semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran kepada seluruh peserta didik.

2. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas

Bagi sekolah yang masih memungut pungutan/sumbangan/iuran pada periode sebelumnya yang dikarenakan terdapat selisih antara RAPBS (kebutuhan riil sekolah) dan BOS, sekolah masih harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. **Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin**, maka sekolah diwajibkan membebaskan pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisa dana BOS (Bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain.
- b. **Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin**, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah.

2.2.2. Mekanisme Pelaksanaan

A. Mekanisme Alokasi Dana BOS

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut :

1. Provinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dan BOS tiap sekolah
2. Alokasi dana BOS untuk sekolah ditetapkan dalam dua tahap, yaitu alokasi di awal triwulan berjalan dan alokasi final untuk dasar penyaluran

lebih/kurang salur, adapun penetapan alokasi dikedua tahap tersebut adalah sebagai berikut :

a. Alokasi sementara untuk penyaluran dan BOS tiap sekolah diawal triwulan didasarkan pada Dapodikdasmen dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Triwulan I (januari-maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 15 Desember tahun sebelumnya
- 2) Triwulan 2 (April – Juni) didasrkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Maret.
- 3) Triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 juli
- 4) Triwulan 4 (Oktober –Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober

b. Alokasi final dan BOS tiap sekolah yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan penyaluran kekurangan / kelebihan salur triwulan berjalan didasarkan data Dapodikdasmen

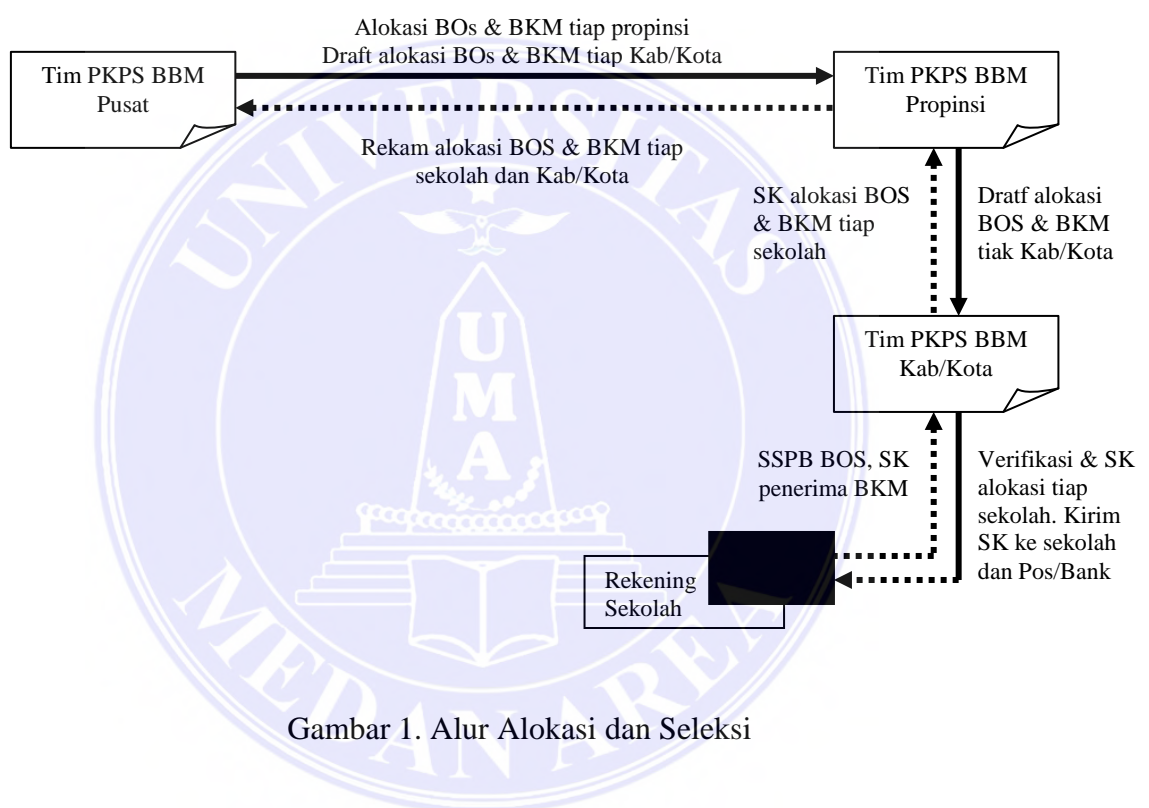
- 1) triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Januari;
- 2) triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 April;
- 3) triwulan 3 (Juli-September) dan
- 4) triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.

c. ketentuan cut-off Dapodikmen untuk penggunaan data dari Dapodikmen pada tiap penetapan alokasi sementara dan alokasi final di atas adalah sebagai berikut:

- 1) cut-off tanggal 15 Desember, data tahun pelajaran 2015/2016 semester 1;
- 2) cut-off tanggal 30 Januari, data tahun pelajaran 2015/2016 semester 2, atau paling lama tahun pelajaran 2015/2016 semester 1;
- 3) cut-off tanggal 1 Maret, data tahun pelajaran 2015/2016 semester 2, atau paling lama tahun pelajaran 2015/2016 semester 1;
- 4) cut-off tanggal 30 April, data tahun pelajaran 2015/2016 semester 2;
- 5) cut-off tanggal 1 Juni, data tahun pelajaran 2015/2016 semester 2;
- 6) cut-off tanggal 21 September, data tahun pelajaran 2016/2017 semester 1, atau paling lama tahun pelajaran 2015/2016 semester 2;
- 7) cut-off tanggal 30 Oktober, data tahun pelajaran 2016/2017 semester 1.

d. Apabila terjadi perubahan data jumlah siswa yang signifikan antara data Dapodikdasmen untuk pencairan awal (butir a) dengan data Dapodikdasmen untuk perhitungan lebih/kurang (butir b), maka Tim

Manajemen BOS Provinsi harus melakukan verifikasi ke sekolah melalui Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk menetapkan data Dapodikdasmen yang akan digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di triwulan berjalan.



Gambar 1. Alur Alokasi dan Seleksi

B. Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS

1. Mekanisme Penyaluran Dana

Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD secara triwulanan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. triwulan 1 (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari;

2. triwulan 2 (April-Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April;
- 3 triwulan 3 (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli;
4. triwulan 4 (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh)hari kerja pada awal bulan Oktober.

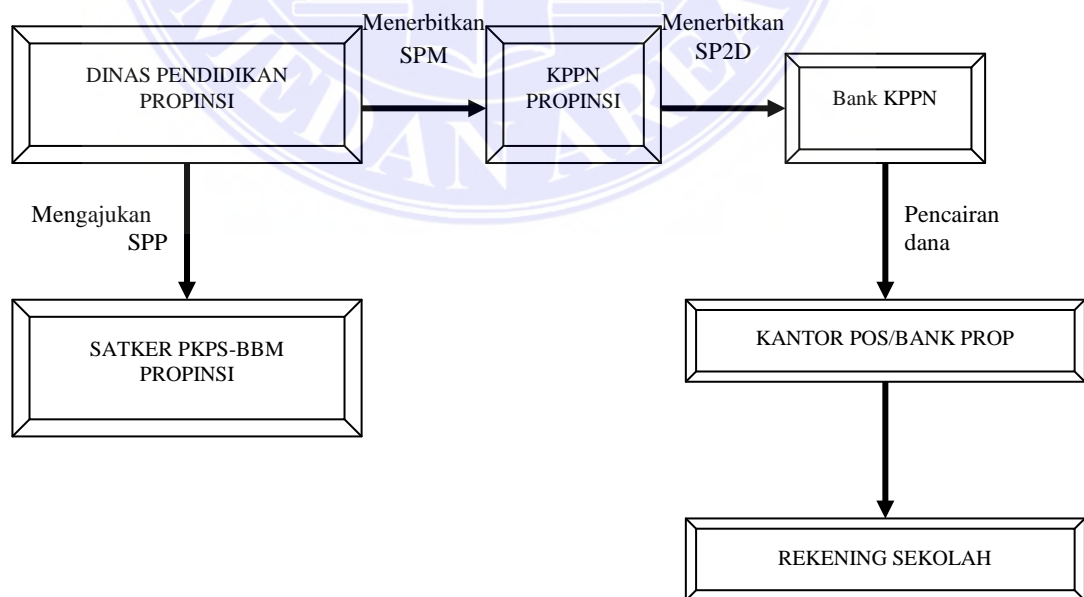
Dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD 6 bulanan (semesteran) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. semester 1 (Januari-Juni) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di Januari;
2. semester 2 (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli. Selanjutnya BUD harus menyalurkan dana BOS ke sekolah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di RKUD.

Penyaluran dana dilaksanakan oleh BUD Tingkat Propinsi melalui PT. Pos/Bank Pemerintah, dengan tahap-tahap sebagai berikut (gambar 3).

1. BUD Propinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi.
2. Dinas Pendidikan Propinsi setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
3. Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Propinsi.

4. KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang membebani rekenis Kas Negara.
5. Selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinasi Pendidikan Propinsi dan Lembaga Penyaluran (Pos/Bank). Perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan untuk periode Juli-Desember dapat digunakan kembali/diperpanjang atau diperbaiki bilamana perlu.
6. Tim BOS Kabupaten/Kota dan Sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor/Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos/Bank bersangkutan dan Tim BOS Propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.



Gambar 2. Mekanisme Penyaluran Dana BOS

2. Pengambilan Dana

- a. BUD Propinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana (Format BOS-05).
- b. Selanjutnya Kantor Pos/Bank yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah, dan masuk dalam pos penerimaan di dalam RAPBS.
- c. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan manajer atau Tim Kab/Kota.
- d. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Tim PKPS-BBM Kab/Kota, dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak apapun.
- e. Bilamana dana BOS yang diterima oleh sekolah melebihi/kurang dari yang semestinya, sekolah diharapkan segera berkoordinasi dengan Tim PKPS-BBM Kab/Kota dan Tim PKPS-BBM Propinsi untuk menyelesaikannya.

C. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah/madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah/Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (*block grant*, hasil unit produksi, sumbangan lain, dsb). Khusus untuk Pesantren Salafiyah, penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Penanggungjawab Program dengan Pengasuh Pondok Pesantren dan disetujui oleh Kasi PEKA PONTREN (Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Bagi sekolah agama non Islam, dalam penggunaan dana BOS Kepala Sekolah/Penanggungjawab Program harus meminta persetujuan dari Kasi PEMBIMAS (Pembimbingan Masyarakat) Departemen Agama Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya Komite Sekolah/Madrasah atau Pengasuh Pondok Pesantren serta Kasi Peka Pontren dan Kasi Pembimas dalam fungsinya sebagai lembaga yang menjadi mitra Kepala Sekolah berkaitan dengan pengelolaan dana BOS disebut sebagai Komite Sekolah.

1. Dana BOS digunakan untuk:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.
- b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.

- c. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
- f. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKS/MKKS.
- g. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel dan perawatan lainnya.
- h. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
- i. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.
- k. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah agama non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.

- l. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
- m. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.

2. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
- b. dipinjamkan kepada pihak lain.
- c. membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
- d. membangun gedung/ruangan baru
- e. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
- f. menanamkan saham
- g. membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

3. Pembatalan BOS:

Dalam hal sekolah penerima BOS mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima BOS atau tutup/bubar maka bantuan dibatalkan dan dana BOS harus disetorkan kembali ke Kas Negara. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota bertanggungjawab dan berwenang untuk membatalkan sekolah penerima BOS.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Pebruari sampai dengan Maret 2017. Ditetapkannya SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai lokasi penelitian dikarenakan SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara telah ditetapkan sebagai Sekolah Rujukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Nomor : 1686/D3/KP/2016 tentang Penetapan Sekolah Rujukan Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016.

3.2. Bentuk Penelitian

Metode penelitian dilakukan melalui analisis deskriptif, yaitu suatu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Analisis deskriptif ini dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki bagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang kuat (Nawawi, 2001:64).

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, tumbuhan, gejala, nilai test, atau peristiwa sebagai sumber daya yang memiliki karakteristik dalam sebuah penelitian (Nawawi, 2011:141). Populasi sasaran pada penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam Program Bantuan Sekolah (BOS) di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Dewan Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, Guru dan Siswa.

Sampel dalam penelitian menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan sengaja dengan tujuan tertentu. Hal ini dilakukan mengingat karena obyek yang akan diteliti (sumber data) sangat luas, yaitu terdiri dari berbagai instansi terkait dalam evaluasi Program Bantuan Sekolah (BOS) di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk sampel sekolah dipilih SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun sampel dalam penelitian ini yang secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara	: 2 orang
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara	: 3 orang
3. Guru Sekolah	: 7 orang
4. Komite Sekolah	: 12 orang
5. Kepala Sekolah	: 1 orang
6. Siswa	: 18 orang
Jumlah	: 43 orang

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan cara :

- a. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang berisikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pelayanan terhadap responden dengan menyajikan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditentukan;
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan sumber informasi yang mengerti permasalahan yang diteliti terutama pada bidang yang menangani langsung pelaksanaan Program;
- c. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang ada keterkaitannya dengan penelitian seperti : laporan, artikel, literatur, dan berbagai bahan – bahan publikasi lainnya.

Untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan persentase dari masing-masing jawaban responden maka setiap pertanyaan akan diberikan empat alternatif jawaban secara tertutup. Kemudian dari empat alternatif jawaban yang disediakan akan diberikan skor sebagai berikut:

- Untuk jawaban alternatif (A) diberi skor 4;
- Untuk jawaban alternatif (B) diberi skor 3;

- Untuk jawaban alternatif (C) diberi skor 2;
- Untuk jawaban alternatif (D) diberi skor 1.

3.5. Definisi Konsep

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu Persepsi Pelaksanaan Program Bantuan Sekolah (BOS) di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Persepsi adalah suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitar melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan sehingga dapat menimbulkan emosi atau rangsangan-rangsangan yang diterima melalui panca indra.
2. Komunikasi :
 - kejelasan konsep program Bantuan Operasional Sekolah
 - kejelasan tujuan/sasaran program Bantuan Operasional Sekolah adanya perangkat aturan yang efektif
3. Sumber-sumber :
 - keahlian/kemampuan yang dimiliki komponen pelaksana
 - otoritas/wewenang yang ada pada pelaksana
 - sumberdaya, dana dan prasarana yang dimiliki

4. Kecenderungan-kecenderungan :

- peranan Dinas Pendidikan
- peranan Dewan Pendidikan
- peranan Komite Sekolah

5. Struktur birokrasi :

- adanya keterpaduan komponen pelaksana dalam pelaksanaan program
- adanya pengaruh dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi keterpaduan komponen pelaksana dalam mencapai tujuan.

3.6. Teknik Analisis Data

Untuk melaksanakan analisis data, dilakukan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan Arikunto (1996:205), sebagai berikut:

a. Persiapan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

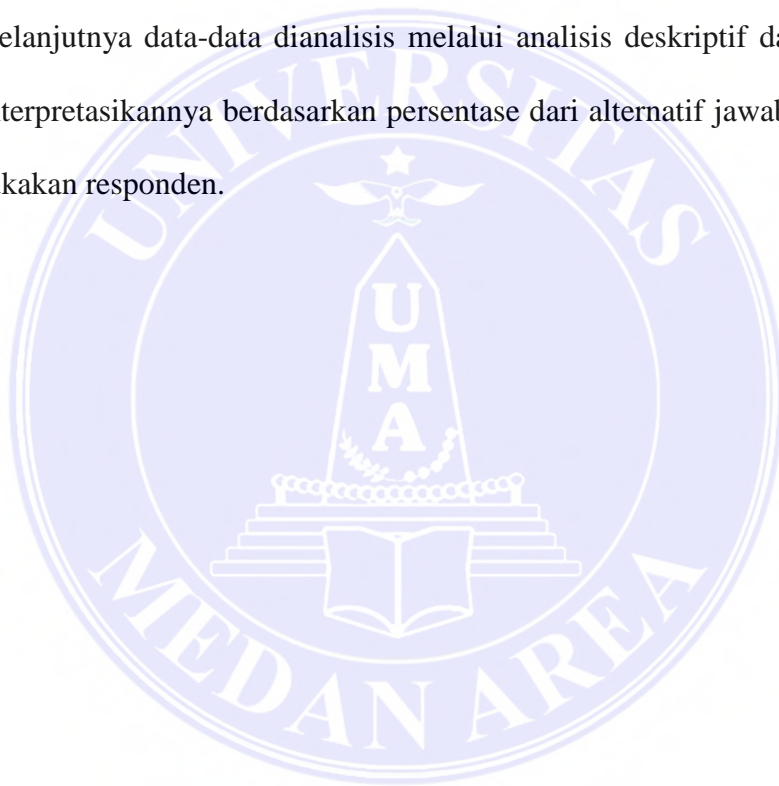
1. Melakukan pengecekan data, identitas dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk analisis;
2. Melakukan pemeriksaan seluruh data yang tertuang dalam instrumen penelitian;
3. Memeriksa tata cara pengisian data.

b. Tabulasi data, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Menjumlahkan setiap rangking tanggapan ke dalam empat rangking tanggapan di setiap nomor angket;

2. Pengkodean pada nomor-nomor tertentu yang tidak dapat rangking tanggapan terutama yang telah salah atau keliru dalam memberikan tanggapan.
- c. Melakukan perubahan jenis data, yaitu dari data yang kuantitatif ke data kualitatif untuk diinterpretasikan secara kualitatif dengan melihat jumlah tanggapan yang telah disediakan pada angket.

Selanjutnya data-data dianalisis melalui analisis deskriptif dan selanjutnya menginterpretasikannya berdasarkan persentase dari alternatif jawaban yang telah dikemukakan responden.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang Persepsi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut :

- 1) Persepsi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan rata-rata total skor 2,75, maka termasuk dalam kategori baik dalam arti bahwa pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut telah berjalan secara efektif.
- 2) Apabila dilihat dari masing-masing indikator, dari keenam indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program (komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi, dan hasil yang diperoleh), hanya indikator sumber-sumber yang termasuk dalam kategori sedang.
- 3) Hambatan utama yang masih ditemukan dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah berkaitan dengan hambatan penyaluran dana Bantuan

Operasional Sekolah yang belum merata atau memenuhi harapan seluruh masyarakat.

5.2. Saran - saran

Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Padang Lawas Utara dan guna mengatasi berbagai hambatan yang dijumpai di lapangan, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk kegiatan sarana dan prasarana, administrasi yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar sesuai dengan buku Panduan BOS yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena komitmen sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola BOS sangat menentukan keberhasilan daripada program BOS baik dalam lingkup internal sekolah maupun daerah.
2. Dalam pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan melalui laporan pertanggungjawaban komite dengan demikian fungsi control akan dapat berjalan efektif dan penyediaan SDM yang berkualitas dalam menangani program BOS di sekolah
3. Dalam proses pencairan dan BOS oleh Pemerintah dilakukan secara tepat waktu yaitu dilakukan tiap triwulan dan pencairan dana BOS dilakukan pada awal bulan. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan operasional sekolah tidak mengalami hambatan sehingga kegiatan belajar mengajar akan dapat berjalan efektif dan tidak terjadi penyelewengan dana.

4. Untuk mengatasi keuangan sekolah, langkah baiknya jika sekolah memiliki unit usaha sekolah yang dapat menghasilkan sumber keuangan bagi sekolah selain dari dana BOS dalam bentuk koperasi sekolah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya defisit keuangan sekolah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, 2006, *Kebijakan Publik*, Jakarta;Suara Bebas
- Agustino, Leo. 2006, *Politik & Kebijakan Publik*, Bandung: APII Bandung
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*
(Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta,
- Bryan & White, 1987, *Manajemen Pembangunan Untuk Pembangunan Negara Berkembang*, alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, Jakarta, LP3ES
- Chris I Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Departement of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State-Nigeria, April 2012, *Public Policy and Challenges of Policy Evaluation in Third World*, “British Journal of Humaniora and Social Science”
- Dunn, William N., 2013, *Analisis Kebijakan Publik*, terjemah *Public Policy Analysis; an Introduction*, Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama
- Hadari Nawawi, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta; GMU Press.
- Hadari Nawawi, 2011, *Metode Pelatihan bidang Sosial*, Yogyakarta, GMU Press.
- Kotler, Philip dan Gary Amstrong, 2008. *Prinsip-PrinsipPemasaran*. Jilid 1. EdisiKeduabelas. Erlangga. Jakarta.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. AlihBahasa : Benyamin Molan. *ManajemenPemasaran*. EdisiKetigabelas. Jilid 1. CetakanKeempat. PT. Indeks. Jakarta

- Lika, 2016. Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2016, 4 (3): 1217-1228. ISSN 2477-2458, [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/.../Lika%20\(10-04-16-08-44-58\).doc](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/.../Lika%20(10-04-16-08-44-58).doc)
- Muhammad Rusli dan Hamsinah, Maret 2014, *Policy Evaluation Study on Subsidy Policy, Qualitative basis, for Poverty Alleviation in Pare-pare, South Sulawesi*, "International Journal of Sains and Research".
- Nazir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta; Graha Indonesia.
- Nugroho D Riant, 2011, *Public policy : Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Manajemen Dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Elex Media Computindo.
- Poerwandani, 2007, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia-Jakarta, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi.
- Putra, 2013, *Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dalam Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Remi dan Tjiptoherijanto, 2013, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta; Elex media Computindo.
- Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, 2013, *RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara 2013-2018*.

- Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, 2016, *Profil Kabupaten Padang Lawas Utara*, website Resmi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Sugiyono, 1998, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung; Alfabeta.
- Sugihartono. Dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Pres.
- Suharno, 2008, Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik, Yogyakarta; UNY Press.
- Setyaningrum, Yuyun Sefri, 2016. Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2013-2014 Pada Sekolah Dasar Negeri 002 Di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. *eJournal Administrasi Negara*, 2016: 4 (1): 2537 – 2550. ISSN, 0000-0000.
- Suharno, 2010, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; UNY Press.
- Surachmad, Winarno, 1990, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Jakarta; Erlangga.
- Sutrisno, 2010, *Organisasi Sektor Publik*, Yogyakarta; Pustaka Utama.
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andy.
- Waidi. 2006. *On Becoming A Personal Excellent*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wibawa dkk, 2012, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta; Erlangga.
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta; Media Press.

Lampiran 1 : DAFTAR PERTANYAAN

PERSEPSI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Studi di SMP Negeri 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

A. PENGANTAR

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dengan judul **“Persepsi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Studi di SMP Negeri 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”**, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktunya guna menjawab pertanyaan-pertanyaan pada daftar ini tanpa prasangka dan perasaan tertekan.

Semua keterangan dan jawaban yang kami peroleh semata-mata untuk kepentingan penelitian dan dijamin kerahasiaannya. Keterangan dan jawaban yang Bapak/Ibu berikan besar sekali artinya untuk kelancaran penelitian yang pada akhirnya akan dapat bermanfaat bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Bapak/Ibu.

Atas bantuan Bapak/Ibu Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih dan semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Terima kasih.

Peneliti,

Edi Saputra Nagabe Siregar

B. KARAKTERITIK RESPONDEN

1. No. Responden :
2. Umur :.....Tahun
3. Jenis Kelamin : (1) Laki-laki (2) Perempuan
4. Pendidikan: (1) Tamat SLTA, (2) Akademi (3) Sarjana (S1)
5. Kedudukan dalam Implementasi Kebijakan sebagai

C. VARIABEL PENELITIAN

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Pelaksanaan Program BOS di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ?
 - (a) Mengetahui
 - (b) Kurang Mengetahui
 - (c) Tidak Mengetahui
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang tujuan/sasaran Pelaksanaan Program BOS di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ?
 - (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui
 - (c) Tidak mengetahui
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang adanya perangkat aturan dalam Pelaksanaan Program BOS di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ?

- (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui
 - (c) Tidak mengetahui
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan yang mengatur secara tertulis tentang Pelaksanaan Program BOS di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ?
- (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui
 - (c) Tidak mengetahui
5. Apakah Bapak/Ibu dapat memahami peraturan tersebut ?
- (a) Memahami
 - (b) Kurang memahami
 - (c) Tidak memahami
6. Bagaimanakah bentuk aturan pemerintah tersebut ?
- (a) Membimbing/mengarahkan
 - (b) Mempersilahkan memilih sendiri
 - (c) Memaksa/menekan
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang sumberdaya alam yang tersedia dapat mendukung kelancaran Pelaksanaan Program BOS di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ?
- (a) Mendukung
 - (b) Kurang mendukung
 - (c) Tidak mendukung

8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Tentang Pengetahuan Kebijakan Pemekaran Kecamatan
- (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui
 - (c) Tidak mengetahui
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Tentang Pengetahuan Tujuan Program
- (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui
 - (c) Tidak mengetahui
10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Tentang Pengetahuan Adanya Perangkat Aturan dalam Kebijakan
- (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui
 - (c) Tidak mengetahui
11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Pengetahuan Adanya Peraturan Tertulis dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemekaran Kecamatan
- (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui
 - (c) Tidak mengetahui
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Pemahaman Peraturan dalam Kebijakan Pemekaran Kecamatan
- (a) Mengetahui

- (b) Kurang mengetahui
- (c) Tidak mengetahui
13. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Ketersediaan Sumberdaya Manusia Mendukung Kelancaran Kebijakan Pemekaran Kecamatan
- (a) Mengetahui
- (b) Kurang mengetahui
- (c) Tidak mengetahui
14. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Ketersediaan Sarana dalam Mendukung Kelancaran Kebijakan Pemekaran Kecamatan
- (a) Mengetahui
- (b) Kurang mengetahui
- (c) Tidak mengetahui
15. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Pelaksanaan Program BOS di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Peraturan
- (a) Mengetahui
- (b) Kurang mengetahui
- (c) Tidak mengetahui
16. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Kesesuaian Pelaksanaan Program BOS di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Petunjuk Pelaksana
- (a) Mengetahui
- (b) Kurang mengetahui
- (c) Tidak mengetahui

17. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Kesesuaian Pelaksanaan Program BOS di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Petunjuk Operasional
- (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui
 - (c) Tidak mengetahui
18. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Kesesuaian Pelaksanaan Program BOS di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Prosedur Kerja
- (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui
 - (c) Tidak mengetahui
19. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Kesesuaian Pelaksanaan Program BOS di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Program Kerja
- (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui
 - (c) Tidak mengetahui
20. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Kesesuaian Kebijakan Pelaksanaan Program BOS di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Jadwal Kerja
- (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui

(c) Tidak mengetahui

21. Apakah Bapak/Ibu apakah ada keterpaduan komponen pelaksana dalam pelaksanaan program pelaksanaan Program BOS di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Jadwal Kerja

(a) Mengetahui

(b) Kurang mengetahui

(c) Tidak mengetahui

22. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang adanya pengaruh dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi keterpaduan komponen pelaksanaan dalam mencapai tujuan Pelaksanaan Program BOS di SMPN 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ?

(a) Mengetahui

(b) Kurang mengetahui

(c) Tidak mengetahui

LAMPIRAN 2. TABULASI DATA

PERSEPSI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Studi di SMP Negeri 2 Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara																					
N O	KOMUNIKA SI					SUMBER- SUMBER					KECENDERUNG AN					STRUKTUR BIROKRASI					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2
3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
4	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
5	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
6	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3
7	3	3	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
8	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3
9	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3
10	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
11	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
12	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	3	1	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	3	3	2	2	2	1	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2
16	3	2	3	2	2	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2

17	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3
18	3	3	3	2	2	3	3	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
20	3	1	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
21	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
22	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
23	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
24	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
26	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
27	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
28	3	3	1	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	3	2	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	3	3	3	3	1
33	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	1
34	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	3	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2
36	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2
37	3	1	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	1
38	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	2	1	3	3	3	3	2

39	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
40	3	3	1	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
42	3	2	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
43	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	4	9	0	1	3	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	0	1	2	2	2	2	0	0
8			5	8	1	6	6	8	0	7	7	2	6	4	8	8	2	6	4	8	8	8	8
544			748						725						897								
2,89			2,30						2,47						2,78								
SKOR RATA-RATA TOTAL : 2,75																							